

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Rudianto dalam buku akuntansi manajemen (2013:9) mengungkapkan definisi akuntansi sebagai berikut:

“...Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut”.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) definisi akuntansi adalah :  
“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) dalam Jusuf Habel (2016) akuntansi adalah: “...an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users”.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan

suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

### **2.1.1.2 Fungsi Akuntansi**

Menurut Kurnia dan Arni (2020:20) akuntansi sangat dibutuhkan dalam usaha karena memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Recording report*, fungsi utama akuntansi yaitu merekam catatan transaksi dengan sistematis dan kronologis. Rekam catatan ini berguna untuk mengetahui laba rugi usaha selama periode akuntansi;
2. Melindungi *property* dan aset, fungsi ini untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu;
3. Mengomunikasikan hasil, untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pengguna informasi akuntansi;
4. Mengklasifikasikan, yaitu untuk memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat;
5. Membuat ringkasan, penyajian laporan keuangan yang dapat berguna bagi pengguna;
6. Analisis dan menafsirkan, penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas usaha sehingga dapat melakukan analisis untuk mempersiapkan rencana di masa mendatang.

### 2.1.1.3 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)  
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)  
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)  
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)  
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)  
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

Dalam penelitian ini, bidang akuntansi yang digunakan oleh penulis yaitu

Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

#### **2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Sukrisno Agoes (2014: 10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014 : 35) adalah sebagai berikut :

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

### 2.1.1.5 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:19), Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan meliputi:

1. Pengukuran dalam mata uang  
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan akuntansi  
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan  
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis  
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi  
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep taat asas  
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas  
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme  
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi  
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan  
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

#### **2.1.1.6 Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2016:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Arief Sugiono dan Edi Untung (2016:1), “laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2017:22), “laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

#### **2.1.1.7 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2018:10), “tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu”.

Secara lebih rinci Kasmir (2018:11), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

#### **2.1.1.8 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut PSAK Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

##### **1. Dapat Dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Paragraf 25).

##### **2. Relevan**

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (Paragraf 26). Dalam relevan ada materialitas yaitu:

###### **a. Materialitas**

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah

serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Paragraf 29).

### **3. Keandalan**

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31). Dalam laporan keuangan yang andal harus melingkupi beberapa yaitu:

#### **a. Penyajian Jujur**

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Paragraf 33).

#### **b. Substansi Mengungguli Bentuk**

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi) (Paragraf 35).

#### **c. Netralitas**

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Paragraf 36).

#### **d. Pertimbangan Sehat**

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang

mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal (Paragraf 37).

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Paragraf 38).

**4. Dapat dibandingkan**

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda (Paragraf 39).

**2.1.1.9 Pihak-pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2018:18) pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ektern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2018:19-23):

1. Pemilik

Pemilik saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a) Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan.
- c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2. Manajemen

Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target yang ditetapkan atau tidak. Manajemen juga dapat melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- b. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pinjaman kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain:

- Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). oleh karena itu, pihak kreditor sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan

melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari kreditor dapat juga diperoleh dari investor melalui penjualan saham. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya.

#### **2.1.1.10 Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2018:8) Laporan Keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri

dari beberapa jenis, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas), perusahaan pada saat tertentu. Neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan), akan tetapi pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam satu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar

merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

#### 5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

### 2.1.1.11 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam PSAK (2016:12), tentang Kerangka Konseptual Pelaporan

Keuangan unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Posisi Keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:
  - Aktiva/aset  
Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.
  - Kewajiban  
Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.
  - Ekuitas/Modal  
Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban.
2. Kinerja  
Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per*

*share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

- Penghasilan (*income*)  
Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.
  - Beban (*expenses*)  
Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.
3. Penyesuaian Pemeliharaan Modal  
Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi.”

Dalam posisi keuangan, aktiva/aset memiliki banyak macamnya salah

satunya adalah aktiva tetap/aset tetap yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### A. Pengertian Aktiva Tetap/Aset Tetap

Menurut Kieso (2011:510), definisi aset tetap atau yang disebut *property, plant, and equipment* adalah:

“...aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk disewakan kepada orang lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:256), aktiva tetap adalah: "...barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan."

Dari penjelasan diatas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi aset tetap adalah aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang dan relatif permanen serta tidak diperjualbelikan.

#### B. Jenis-Jenis Aktiva Tetap/Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257), dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. "Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
  2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
  3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya."
- #### C. Pengungkapan Aktiva Tetap/Aset Tetap

Dalam laporan keuangan aset tetap dirinci menurut jenisnya seperti: tanah, bangunan, alat-alat berat, mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris kantor. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aset

tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan. Metode penyusutan yang ditetapkan perusahaan dan taksiran masa manfaat perlu dijelaskan dalam laporan keuangan.

Menurut Dwi Martani (2012:290), Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, antara lain:

- a. “Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan diakumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.”

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10

(2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

**a. Laporan Posisi Keuangan**

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- Aktiva Lancar

“...uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian

dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. Piutang Wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- c. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
- d. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- e. Piutang penghasilan atau Penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
- f. Persekot atau Biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.”

- Aktiva tidak lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. “Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva Tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

1. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban atau hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu

tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi. Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:
  - a. Hutang Obligasi
  - b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
  - c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

## 2. Ekuitas

Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:20), Ekuitas adalah:

“... hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Istilah lain yang digunakan adalah *stockholder's equity* atau modal pemegang saham. Ekuitas terdiri dari modal dan laba ditahan

1. Modal dapat diperoleh dari dana pemilik perusahaan ataupun dari pelepasan saham perusahaan ke investor.
2. Laba ditahan (saldo laba) merupakan akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan.

### **b. Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Menurut Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:21)

“...laporan laba rugi menginformasikan dan membandingkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya selama periode waktu tertentu misal bulanan atau tahunan. Pendapatam adalah uang yang diterima perusahaan karena telah menjual barang dan jasa yang

dihasilkan. Beban (*expense*) adalah kos(*cost*) yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.

Komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

#### 1. Pendapatan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) paragraf 06 (2018:4),

pendapatan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

#### 2. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian

Laporan Keuangan paragraph 78 (2014:14), definisi beban yaitu:

“... mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi

terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)  
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
2. Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)  
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
  - g. Bahan Baku (*Raw Material*)
  - h. Upah Langsung (*Direct Labour*)
  - i. Biaya pabrik (Biaya overhead)

3. Laba kotor (*Gross profit*)  
Laba kotor (*Gross profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)  
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)  
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*) Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*)  
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (*Retained Earning*)  
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

Menurut (Hery, 2019) pencadangan atas laba ditahan mungkin dilakukan, diantaranya adalah untuk membeli treasury stock, melunasi utang jangka panjang, melakukan pelunasan pabrik, membuka kantor cabang baru, mengatasi ketidakpastian, dan lain sebagainya. Selain dicatat dalam jurnal, peristiwa pencadangan laba ditahan ini juga umumnya perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jurnal akan dibuat dengan cara mendebet akun laba ditahan yang tidak dicadangkan (*unappropriated retained earnings*) dan mengkreditkan akun laba ditahan yang dicadangkan (*appropriates retained earnings*).

**c. Laporan Perubahan Ekuitas**

Menurut Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:26) Laporan Perubahan ekuitas yaitu:

“Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan semua perubahan dalam ekuitas pemilik untuk jangka Panjang tertentu. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan tentang dampak transaksi ekuitas pemilik selama suatu periode akuntansi. Pernyataan dalam laporan perubahan ekuitas menginformasikan saldo awal dan saldo akhir modal sehingga memberikan gambaran setiap tambahan modal yang dilakukan selama periode akuntansi.

**d. Laporan Arus Kas**

Menurut PSAK Nomor 2 paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. “Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
  - Penerimaan kas dari royalty, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
  - Pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa;
  - Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
  - Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, iklim, anuitas, dan manfaat polis lainnya;
  - Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diindikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktifitas pendanaan dan investasi;
  - Penerimaan dan pembayaran kas dari kontak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (*dealing*).
2. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
  3. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

1. “Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
  - a. Menjual barang atau jasa.
  - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (*supplier*).
  - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
  - d. Pembayaran pajak.
  - e. Pembayaran bunga dan hutang.
2. Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:
  - a. Menambah atau menjual aktiva tetap.
  - b. Membeli atau menjual anak perusahaan.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*). Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:

- a. Menambah atau membayar hutang.
- b. Menambah saham/ obligasi.
- c. Pembayaran deviden”.

**e. Catatan atas Laporan Keuangan**

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“...berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan ), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan laporan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”

**2.1.1.12 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Menurut Pohan (2015:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak (Taufan Maulamin dan Sartono, 2021:6).

Menurut Siti Resmi (2019:376), penyebab perbedaan laporan keuangan

komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

- a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
- c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir

sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
    - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
    - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
    - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
    - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
    - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
    - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
  - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
    - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
    - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
    - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
  - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
  - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
  - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
  - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
- a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
  - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
  - c) Pajak penghasilan.
  - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
  - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).

- a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:
- Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
  - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
  - Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Menurut Suandy (2016:96), perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Menurut Pohan (2015:322), beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda waktu terdiri dari
- Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
  - Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.
  - Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*).
  - Penyisihan kerugian persediaan.
  - Penyisihan pesangon.
  - Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
  - Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

### **2.1.1.13 Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak) (Siti Resmi, 2019:375).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:376), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan

prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan”.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Siti Resmi, 2019:376).

Menurut Pohan (2015:318), rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Menurut Siti Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya

atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Pohan (2015:318), fiskus menggunakan istilah Penyesuaian

Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif (yang sama pengertiannya dengan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif) berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.141/PJ./2004:

- a. “Penyesuaian fiskal positif  
Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
- b. Penyesuaian Fiskal Negatif  
Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dana atau menambah biaya-biaya komersial.”

Menurut Pohan (2015:319), ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

1. “Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:
  - a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
  - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
  - c. Biaya yang diakui lebih kecil.
  - d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

- e. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
2. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:
    - a. Biaya yang diakui lebih besar.
    - b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
    - c. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.”

### 2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Scott (2015) dalam Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022) menjelaskan bahwa teori agensi merangkum bagaimana hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal berwenang untuk memberikan tugas kepada agen semata-mata demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara agen adalah pihak yang mengerjakan segala keperluannya. Chariri dan Ghazali (2007) dalam Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022), menjelaskan bahwa dalam teori agensi terdapat tiga hubungan, yaitu: hubungan agen dengan pemegang saham, kreditur dan pemerintah

Dalam perspektif teori agensi di pengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara *agent* (perusahaan) dengan *principal* (pemerintah). *Agency theory* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kontrol yang rendah atas perusahaan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan *agency theory*, pemerintah menginginkan pajak yang di bayarkan setara dengan laba yang dimiliki namun perusahaan berupaya untuk membayarkan beban pajaknya seminimal mungkin dengan cara melakukan penghindaran pajak (Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM, 2022:92).

### 2.1.3 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:114) sebagai berikut:

*“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded that another type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”.*

Menurut Scott (2009:13), asimetri informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

*“1. Adverse Selection*

*Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.*

*2. Moral Hazard*

*Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.”*

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungut pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Kesit Bambang Prakoso, 2014).

## **2.1.4 Konservatisme Akuntansi**

### **2.1.4.1 Definisi Konservatisme Akuntansi**

Menurut Hendriksen dan Breda yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2000: 157), bahwa konservatisme adalah:

“... istilah yang digunakan untuk mengartikan bahwa akuntan harus melaporkan yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan dan yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban”.

Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:23) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi sebagai pengakuan awal biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Menurut Enni Savitri (2016:21), Konservatisme secara mudah dapat diinterpretasikan sebagai kehati-hatian (*prudent*) dengan kehati-hatian maka kecenderungan yang ada di dalam laporan adalah pesimisme.

Berdasarkan beberapa pengertian konservatisme akuntansi di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi merupakan tindakan berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara melaporkan yang terendah dari aktiva dan pendapatan dan yang tertinggi dari kewajiban dan beban.

#### **2.1.4.2 Jenis-jenis Konservatisme Akuntansi**

Menurut Subramanyam (2010:92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).
2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau *goodwill* apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.

Dari kedua jenis konservatisme tersebut, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

#### **2.1.4.3 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK**

Menurut Enni Savitri (2016:25), PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada

akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (*first in first out*) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.
3. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tsb akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

#### **2.1.4.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi**

Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:45), membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt (2003):

### 1. *Earning/Stock Return Relation Measure*

Menurut Basu (1997) dalam Enni Savitri (2016:50), konservatisme diukur pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan. Konservatisme diukur dengan cara membentuk regresi antara *return* saham terhadap laba

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_1 R_{it} DR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

EPS<sub>it</sub> : *Earnings per share* untuk perusahaan i tahun t

P<sub>it</sub> : Harga pasar pembukaan untuk perusahaan I tahun t

R<sub>it</sub> : Return saham perusahaan i tahun t

DR<sub>it</sub> : 1 bila return pasar untuk perusahaan i pada tahun t adalah negatif dan 0 bila sebaliknya.

$\alpha_0$  : Intersep

$\alpha_1$  : Koefisien variabel dummy jenis periode

$\beta_0$  : Koefisien (slop) regresi

$\beta_1$  : Koefisien variabel interaksi return dan jenis periode

$\varepsilon_{it}$  : *Error terms*

### 2. *Earning/Accrual Measures*

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur konservatisme akuntansi menurut Givoly dan Hayn (2002) dalam Enni Savitri (2016:52), yaitu:

$$CONACC = \frac{(NIO+DEP-CFO) X (-1)}{TA}$$

Keterangan:

CONACC : *Earnings conservatism based on accrued items*

NIO : *Operating profit of current year*

DEP : *Depreciation of fixed assets of current year*

CFO : *Net amount of cash flow from operating activities of current year*

TA : *Book value of closing total Assets.*

Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam *net income* tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan (Enni Savitri 2016:47).

Menurut Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi (2016), ukuran konservatisme di atas harus dikali -1, sehingga semakin besar nilai positif rasio, maka semakin konservatif.

Apabila hasil bertanda positif, maka perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Namun bila hasil bertanda negatif, perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi (Kadek Nita Sumiari dan Dewa Gede Wirama, 2016)

### 3. *Net Asset Measure*

Menurut Beaver dan Ryan (2000) dalam Enni Savitri (2016:48) perhitungan *Net Asset Measures* menggunakan proksi rasio *Market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai

$$\text{Market/Book(M/B) Ratio} = \frac{\text{Market price share of common stock}}{\text{book value per share of common stock}}$$

Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya (Enni Savitri 2016:48)

Adapun komponen untuk menentukan Konservatisme Akuntansi yang terdapat dalam rumus *Earning/Accrual Measures CONACC* menurut Givoly dan Hayn (2002) yaitu depresiasi. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas.

#### 1. **Depresiasi**

Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat

penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu bagi suatu perusahaan biaya pemeliharaan menjadi lebih penting, sehingga *cost* yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus (Fahmi, 2015:100).

### **Faktor yang Menentukan Beban Penyusutan**

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan (Atichasari, 2023: 45), yaitu berikut ini:

1. Harga Perolehan (*Costs*)

Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.

2. Umur Ekonomis (*Useful-Life*)

Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis suatu aktiva tetap harus ditaksir setelah memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Taksiran kerusakan fisik karena pemakaian.
- b. Keusangan karena waktu.

- c. Hukum atau pembatasan-pembatasan lain terhadap penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan.
3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (Salvage Value)  
Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu aktiva tetap yang dihapuskan akan meliputi harga penjualan yang diperkirakan atau nilai pertukaran atau nilai bekas yang tak dipakai lagi atau nilai akhir (junk value) jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya dari pelaksanaan penarikan aktiva tetap tersebut, seperti biaya pembongkaran, biaya lelang, biaya pemindahan, dan lain-lain. Hasil penjualan aktiva tersebut setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijaksanaan pemberhentian aktiva dari pemakaiannya.
4. Metode Penyusutan  
Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva. Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva yang lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan.

### **Macam-Macam Metode Depresiasi**

Menurut Atichasari (2023: 48) metode depresiasi merupakan suatu yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap dialokasikan. Oleh karena itu, agar alokasi harga perolehan sebagai pengakuan biaya bisa mendekati tepat maka harus digunakan metode depresiasi yang sesuai dengan pola pemakaian aktiva tetap yang bersangkutan.

Ada beberapa metode depresiasi yang biasa digunakan dan perlu Anda ketahui (Atichasari, 2023: 49), yaitu berikut ini.

1. Depresiasi yang dihitung berdasarkan aktivitas aktiva tetap (Metode Aktivitas).  
Metode Aktivitas Suatu aktiva tetap yang di depresiasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, metodenya disebut dengan metode aktivitas (activity method). Metode aktivitas menggunakan pendekatan pembebanan variabel dengan asumsi bahwa depresiasi merupakan fungsi dari produksi. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis aktiva tetap diukur berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang mampu diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Secara konseptual, metode ini paling mendekati ketepatan terhadap pola pemakaian aktiva tetap sehingga apabila dapat diketahui kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis selama pemakaiannya dan bisa ditentukan berapa banyak penggunaan manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut untuk satu periode maka akan dapat ditentukan secara tepat besarnya alokasi harga perolehan aktiva tetap untuk satu periode tersebut
2. Metode Garis Lurus (Straight-Line Method)  
Metode garis lurus dipakai untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap apabila diperkirakan bahwa aktiva tetap tersebut memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama besarnya untuk setiap periode selama masa penggunaannya. Umur ekonomis yang digunakan pada metode garis lurus dihitung atas dasar umur (masa pakai) aktiva tetap yang bersangkutan. Metode garis lurus ini menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu
3. Depresiasi dengan pembebanan yang menurun.  
Depresiasi Dengan Pembebanan Yang Menurun Metode depresiasi yang lazim digunakan untuk pembebanan depresiasiyang menurun ada 2, yaitu berikut ini.
  - a. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year's Digits Method) Dengan menggunakan metode ini, suatu aktiva tetap di susut dengan jumlah yang semakin mengecil. Depresiasi per tahun dihitung sebesar proporsi antara Sisa Umur Penggunaannya dari Nilai Penjumlahan Umur Penggunaan Aktiva Tetap terhadap bagian harga perolehan aktiva tetap tersebut
  - b. Metode persentase tetap dari nilai buku (Metode Saldo yang Menurun/Declining Balance Method)  
Metode saldo yang menurun dalam metode saldo yang menurun, depresiasi suatu aktiva tetap dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai bukunya pada awal tahun.

## **2. Amortisasi**

Amortisasi adalah alokasi atas pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap yang tidak berwujud atau pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Setu Setyawan, 178:2022)

## **3. Depleksi**

Selain aset tidak berwujud yang telah dibahas di atas, perusahaan juga dapat memperoleh aset untuk mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan atau penggalian. Contoh hak penguasaan hutan, hak untuk menambang minyak dan gas bumi. Biaya untuk memperoleh hak tersebut setiap periode akan berkurang sebagai akibat pemanfaatan atau penggalian sumber daya. Pembebanan biaya semacam ini disebut dengan istilah depleksi. Depleksi pada dasarnya dapat disamakan dengan penyusutan pada aset tetap (Zainal Arifin, 2009:149).

### **2.1.5 *Financial Distress***

#### **2.1.5.1 *Definisi Financial Distress***

Kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Rudianto 2013:251).

Menurut Murniati dan Arita (2016:101) *financial distress* merupakan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan atau kepailitan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba sesuai dengan tujuan utamanya yaitu memaksimalkan laba.

*Financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Fahmi, 2012: 158)

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan terjadi sebelum kebangkrutan, yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya.

#### **2.1.5.2 Kategori *Financial Distress***

Menurut Irham Fahmi (2015:159), untuk persoalan *financial distress* secara kajian umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang bisa kita buat, yaitu:

- a. **Pertama**, *financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit). Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
- b. **Kedua**, *financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak

dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.

- c. **Ketiga**, *financial distress* kategori C atau sedang, dan ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan Tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun di sini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan Sebagian untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada public atau yang dikenal dengan istilah *stock repurchase* atau *buy back*. Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah dijual kepasar mengandung berbagai arti bagi suatu perusahaan, antara lain:
- 1) Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran;
  - 2) Perusahaan telah membei sinyal positif ke pasaran, bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup;
  - 3) Diharapkan dengan membeli saham, *Earning pershare* akan mengalami kenaikan; dan
  - 4) Dengan terjadinya peningkatan *Earning pershare* (EPS) diharapkan *market price pershare* juga akan mengalami kenaikan.
- d. Keempat, *financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan *financial reserve* (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini terjadi pada anak perusahaan (*subsidiaries company*) maka itu bisa diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak manajemen kantor pusat (*head office management*)

### 2.1.5.3 Manfaat Informasi Kebangkrutan

Menurut Rudianto (2013:253), Informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

#### 1. Manajemen

Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalkan. Langkah pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan.

#### 2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut. Pada langkah berikutnya, informasi tersebut berguna untuk memonitor pinjaman yang telah diberikan.

#### 3. Investor

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka perusahaan calon investor itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

#### 4. Pemerintah

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

#### 5. Akuntan Publik

Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan *going concern* perusahaan tersebut.

#### 2.1.5.4 Penyebab *Financial Distress*

Menurut Rudianto (2013:252), secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, penting sekali memahami berbagai jenis kegagalan yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Terdapat tiga jenis kegagalan dalam perusahaan, yaitu:

- a. Perusahaan yang menghadapi *technically insolvent*, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo tetapi nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya.
- b. Perusahaan yang menghadapi *legally insolvent*, jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan.
- c. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit.

Secara umum, penyebab utama kegagalan sebuah perusahaan adalah manajemen yang kurang kompeten. Tetapi penyebab umum kegagalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsipnya, penyebab kegagalan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

##### 1. Faktor Internal

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, meliputi faktor keuangan maupun nonkeuangan.

Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan.
- b. Adanya "*current liabilities*" yang terlalu besar di atas "*current assets*".
- c. Lambatnya penagihan piutang atau banyaknya "*bad debts*" (piutang tak tertagih).

- d. Kesalahan dalam “*dividend policy*”.
  - e. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan.
- Kesalahan pengelolaan di bidang nonkeuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:
- a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan.
  - b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan.
  - c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan.
  - d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan.
  - e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan.
  - f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian.
  - g. Kesalahan dalam kebijakan produksi.
  - h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran.
  - i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan.

## **2. Faktor Eksternal**

Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha, yaitu:

- a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional.
- b. Adanya persaingan yang ketat.
- c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya.
- d. Turunnya harga-harga dan sebagainya.

### **2.1.5.5 Metode Pengukuran *Financial Distress***

#### **2.1.5.5.1 Analisis Altman Z-Score**

Rudianto (2013:254) menyatakan bahwa, Analisis *Z-Score* adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti, dengan metode *Z-Score* dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Rumus *Z-Score* pertama dihasilkan Altman pada tahun 1986. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok

digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public*. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan:

$X_1$  = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

$X_2$  = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

$X_3$  = EBIT dibagi dengan Total Aset

$X_4$  = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Utang

$X_5$  = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 unsur yang berbeda, di mana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Definisi dari diskriminasi Z (zeta) adalah;

a. Rasio  $X_1$  (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar – utang lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun. Rasio ini dapat dicari dengan rumus:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

b. Rasio X<sub>2</sub> (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi.

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

c. Rasio X<sub>3</sub> (EBIT : Total Aset)

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor.

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio X<sub>4</sub> (Nilai Saham : Total Utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (*DER = Debt To Equity Ratio*) yang lebih terkenal. Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan pasar saham per lembar sahamnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasi lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Pasar Saham}}{\text{Total Utang}}$$

e. Rasio  $X_5$  (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Nadiah Vardah Varassah (2018), setelah didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan model persamaan Altman *Z-Score*, maka akan disesuaikan dengan kriteria penilaian atau titik *cut off* sebagai berikut:

1.  $Z \geq 2,99$  = Perusahaan tidak mengalami *financial distress*
2.  $1,81 \leq Z < 2,99$  = Perusahaan berada di zona rawan (*grey area*) dan perusahaan harus waspada
3.  $Z < 1,81$  = Perusahaan mengalami *financial distress*

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak *go public*. Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak *go public*, sebagai berikut:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus *Z-Score* tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur *non go public*. Untuk itu Altman kembali melakukan penelitian di Mexico (negara berkembang) dengan harapan bahwa rumus *Z-Score* dapat digunakan dalam perusahaan *go public* maupun *non go public*.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1.  $Z > 2,9$  = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2.  $1,23 < Z < 2,9$  = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.

3.  $Z < 1,23$  = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi))

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan, Altman tidak berhenti. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang *go public* maupun yang tidak. Rumus *Z-Score* terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang *go public* maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada model terakhir ini rasio *sales to total asset* dihilangkan dengan harapan dampak industri – dalam pengertian ukuran perusahaan terkait dengan aset atau penjualan – dapat dihilangkan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1.  $Z > 2,6$  = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2.  $1,1 < Z < 2,6$  = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
3.  $Z < 1,1$  = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi).

#### **2.1.5.5.2 Analisis *Springate Score***

Menurut Rudianto (2013:262), *Springate Score* adalah metode untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi, dengan metode *Springate Score* dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang dapat mendeteksi kemungkinan kebangkrutan, *Springate* menggunakan MDA untuk memilih 4 rasio

dari 19 rasio keuangan yang populer dalam literatur-literatur, yang mampu membedakan dengan baik antara sinyal usaha yang pailit dan tidak pailit.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Springate Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$S = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan:

$X_1$  = Modal Kerja/Total Aset

$X_2$  = EBIT/Total Aset

$X_3$  = EBT/Utang Lancar

$X_4$  = Penjualan/Total Aset

#### 2.1.5.5.3 Analisis Zmijewski

Menurut Rudianto (2013:264), Zmijewski Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan umum yang memberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya.

Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Zmijewski Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Keterangan :

$X_1 = \text{Net Income/Total Assets}$

$X_2 = \text{Total Liabilities/Total Asset}$

$X_3 = \text{Current Assets/Current Liabilities}$

Salah satu komponen yang menentukan *Financial Distress* yang terdapat dalam rumus Altman Z-Score pertama menurut Rudianto (2013:254) adalah Modal Kerja dan Nilai Pasar Saham. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas.

#### 1. Modal Kerja

Menurut Agung Anggoro, dkk (2023:121), Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar utang jangka pendek. Modal kerja juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan dan membiayai investasi jangka pendek. Modal kerja merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai operasi harian dan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. Modal kerja dihitung dengan mengurangi aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin besar modal kerja, semakin baik likuiditas perusahaan dan semakin kuat kemampuannya untuk mengatasi darurat keuangan. Oleh karena itu, modal kerja harus dipertahankan pada tingkat yang memadai.

Jenis-jenis modal kerja menurut Ahmad Bairizki dkk (2022:167)

1. Modal kerja permanen, modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di perusahaan agar dapat menjalankan setiap kegiatan dalam satu periode akuntansi.
  - a. Modal kerja primer (*primary working capital*), modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin perusahaan dapat beroperasi.
  - b. Modal kerja normal (*normal working capital*), modal kerja yang wajib dan harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal.
2. Modal kerja variabel (*variable working capital*), modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode.
  - a. Modal kerja musiman (*seasonal working capital*), yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim.

- b. Modal kerja darurat (*emergency working capital*), yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya.
- c. Modal kerja siklus (*cyclis working capital*), yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk.

## 2. Nilai Pasar Saham

Menurut Ari Agung Nugroho, dkk (2022:84), berikut ini beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu:

### 1. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku (*book value*) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang.

### 2. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai Pasar (*market value*) merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

### 3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham, dengan kata lain nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya.

Menurut Widodoatmojo (2005:54) dalam Ari Agung Nugroho, dkk (2022:81), Adapun jenis-jenis harga saham adalah sebagai berikut:

### 1. Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

### 2. Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

### 3. Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi

melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

#### 4. Harga Pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukuan. Namun tidak selalu terjadi.

#### 5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau yang ini terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

#### 6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak ada pada harga yang sama.

#### 7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

#### 8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah pada satu periode.

Menurut Fahmi (2015:53), ada beberapa pengertian saham adalah:

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing- masing (Fahmi, 2015:54).

1. *Common Stock* (saham biasa)

*Common stock* (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (vote) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (claim) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

*Common stock* ini memiliki beberapa jenis yaitu:

a) *Blue Chip-Stock* (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan management yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh blue chip.

b) *Growth Stock*. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.

c) *Defensive Stock* (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori *food and beverage*, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.

d) *Cyclical Stock*. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan *real estate*. Sebaliknya saham non siklis mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.

e) *Seasonal Stock*. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.

f) *Speculative Stock*. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya

dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.

2. *Preferred Stock* (saham istimewa)

*Preferred Stock* (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

Menurut Ari Agung Nugroho, dkk (2022:79), harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham.

## 2.1.6 *Capital Intensity*

### 2.1.6.1 *Definisi Capital (Modal)*

Menurut Munawir (2007:19), modal adalah: "... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya".

Menurut Lucas Setia Atmaja (2008:155) modal adalah "... dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan".

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *capital* (modal) adalah dana yang digunakan perusahaan dalam aktivitas pendanaan atau operasi perusahaan.

### 2.1.6.2 *Jenis-jenis Capital (Modal)*

Jenis-jenis modal menurut Bambang Riyanto (2001: 227 & 240), adalah:

1. “Modal Asing  
Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan “hutang” yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing atau hutang terbagi atas tiga golongan, yaitu:
  - a. Hutang Jangka Pendek (Short-term Debt)
  - b. Hutang Jangka Menengah (Intermediate-term Debt)
  - c. Hutang Jangka Panjang (Long-term Debt)
2. Modal Sendiri  
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan”.

### **2.1.6.3 Definisi *Intensity* (Intensitas)**

Menurut Ashari M. Hafi (1996) dalam Kamus Psycology, intensitas adalah kuatnya tingkah laku atau pengalaman, atau sikap yang dipertahankan”.

Adapun definisi intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “... keadaan tingkat atau ukuran intens. Intens di sini merupakan sesuatu yang hebat atau sangat tinggi, bergelora atau penuh semangat dan sangat emosional.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas adalah suatu keadaan atau tolak ukur yang begitu kuat atau sangat besar.

### **2.1.6.4 Definisi *Capital Intensity***

Menurut Hanum (2013:4), *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah:

“... aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan”.

Menurut Sartono (2008:120), capital intensity adalah:

“... rasio antara fixed asset (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi”.

Menurut Noor et al., (2010:190), capital intensity adalah:

“... rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap”.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah rasio antara aktiva tetap terhadap total aktiva. Rasio intensitas modal digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap untuk menghasilkan pendapatan.

#### **2.1.6.5 Pengukuran *Capital Intensity***

Menurut Sartono (2008:120), capital intensity adalah:

“... rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi”.

Sartono (2008:131), menyatakan bahwa capital intensity dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Capital Intensity Ratio = \frac{Total Aset Tetap}{Total Aset} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Riyanto (2015) rasio intensitas modal menunjukkan efisiensi perusahaan dalam penggunaan seluruh aktiva untuk menghasilkan

penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut. Maka capital intensity diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## **2.1.7 Tax Avoidance**

### **2.1.7.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Sumarsan, Thomas, 2019:3):

“pajak adalah iuran masyarakat masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada

negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran rakyat.

### **2.1.7.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) , yaitu sebagai berikut:

4. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
5. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **2.1.7.3 Jenis Pajak**

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut (Agoes, Sukrisno, 2014:7) antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

#### **2.1.7.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*  
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*  
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*  
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”

#### **2.1.7.5 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional  
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif Tetap  
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

3. Tarif Progresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
4. Tarif Degresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.1.7.6 Definisi *Tax Avoidance***

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), penghindaran pajak yaitu :

*“... tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal”.*

*Tax Avoidance represents a firm's deliberate efforts to reduce its tax liabilities through either legal or illegal means or strategies.* (Lee et al., 2015)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah penuruna/ penghematan pajak yang dilakukan perusahaan baik secara legal maupun *illegal*.

#### **2.1.7.7 Cara Melakukan Penghindaran Pajak**

Menurut Syafi'i dan Ali Mudhor (2022:23), penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan Diri  
Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.  
Contoh:
  - a) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembak
  - b) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut.
  - c) Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik.
2. Pindah Lokasi  
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di

Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka.

3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

**2.1.7.8 Pengukuran Tax Avoidance**

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, yaitu:

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of book income
Current ETR	$\frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of book income
Cash ETR	$\frac{\textit{Worldwide cash taxes paid}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\Sigma(\textit{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\textit{Worldwide total pretax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over and years

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	<i>The difference of between a firm`s GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression:</i> $\text{ETR differential} * \text{Pre-tax book income} = a + b\text{Controls} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Total BTD	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$	
Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD} / \text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total booktax differences</i>
Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS</i>

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
		<i>confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135) sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Net income before tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Cash Tax Paid* = Pembayaran Pajak  
*Net Income Before Tax* = Laba Bersih Sebelum Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 25% (≥25%), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

Adapun menurut Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22% ( $<22\%$ ) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari sama dengan 22% ( $\geq 22\%$ ), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Prinsip ini akan mempengaruhi laba perusahaan, karena beban-beban diakui lebih awal dibandingkan pendapatan akan menyebabkan laba perusahaan menjadi rendah sehingga pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga rendah. (Mira dan Bornok Situmorang, 2021).

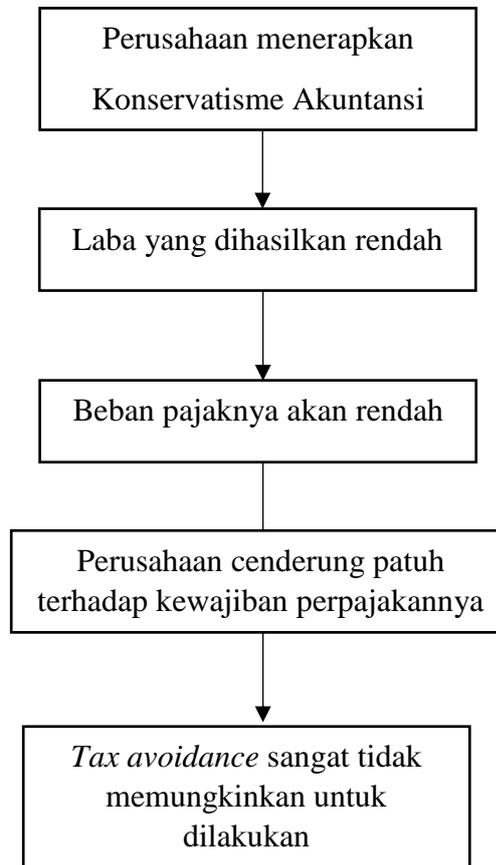
*Normative beliefs* berkaitan dengan konservatisme akuntansi, dimana manajer dalam menerapkan konservatisme dalam suatu perusahaan dapat mengelola laba dengan cara penerapan laba yang ketat sehingga laba yang dihasilkan rendah dan beban pajaknya akan rendah. Suatu perusahaan yang

memiliki beban pajak yang rendah, akan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain perusahaan itu meminimalkan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). (I Gusti Agung Istri Windaryani dan I Ketut Jati, 2020). Laba bersih yang berkurang maka pajak penghasilan yang dihasilkan juga akan semakin berkurang, sehingga praktik *tax avoidance* sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan (Renaldi Alfarasi dan Dul Muid, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vinny Alvionita, dkk (2021), Riska Sakhiya Ellyanti dan Titiék Suwarti (2022), dan Deby Kustia Pratiwi dan Atik Djajanti (2022) yang menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

## Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi

terhadap *Tax Avoidance*



**Gambar 2.1**

### Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

#### 2.2.2 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

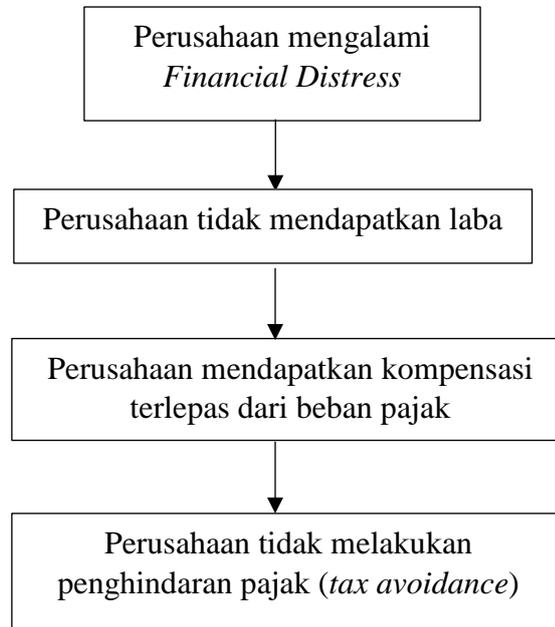
Perusahaan yang mengalami *financial distress* (FD) akan selalu mengalami kerugian atau tidak mendapatkan laba atau pendapatan, sehingga perusahaan tidak mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian akan mendapatkan kompensasi terlepas dari beban pajak,

jadi perusahaan akan memilih untuk tidak melakukan *tax avoidance* (Muhammad Taufik dan Muliana, 2021).

Menurut Hartoto (2018) dalam Ni Putu Devi Pratiwi, dkk (2021), *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan, jika perusahaan terlibat dalam *financial distress* dimana perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan dipandang terlalu beresiko untuk melakukan *tax avoidance*. Sebab perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dalam kondisi *financial distress* akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vinny Alvionita, dkk (2021), Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022), dan Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

## Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*



**Gambar 2.2**

## Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

### 2.2.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

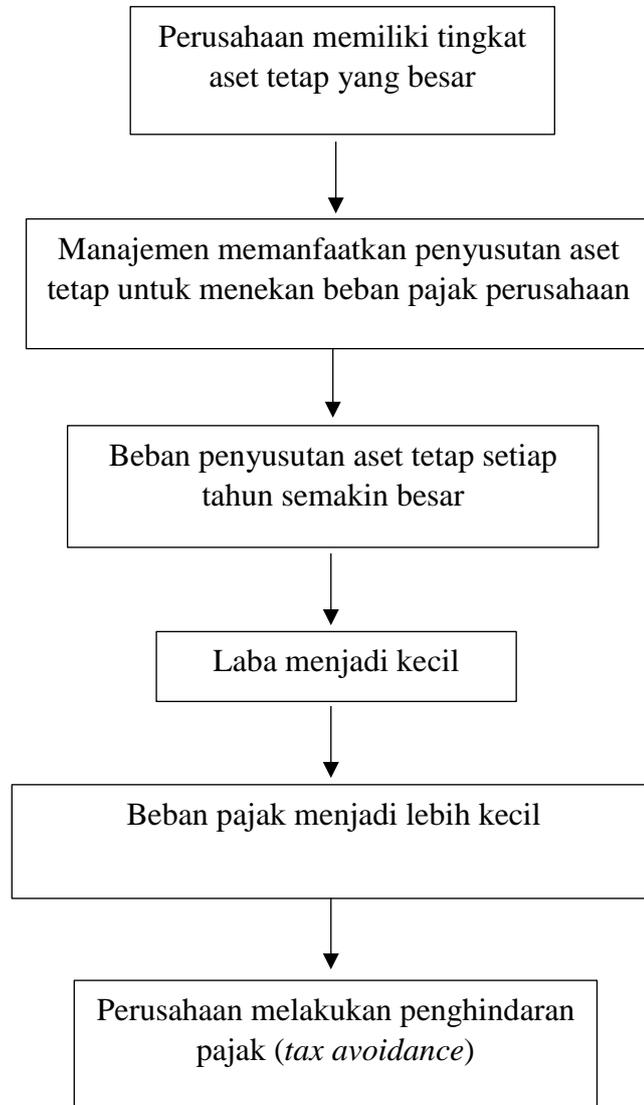
Rodriguez & Arias (2012) dalam Puspitasari (2021), menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak akibat beban penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Artinya, perusahaan dengan dengan aset tetap yang besar akan membebankan penyusutan yang besar sehingga menghasilkan laba yang kecil. Laba yang kecil mengakibatkan kecilnya beban pajak perusahaan.

Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana

menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak (Darsono, 2015). Dengan demikian, besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan potensi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Puspitasari, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018), Efrida Siboro dan Hendra F. Santoso (2021), Roslan Sinaga dan Harman Malau (2021), Vinny Alvionita, dkk (2021), dan Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*



**Gambar 2.3**

### Kerangka Pemikiran Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

#### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1:** Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**H2:** *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

**H3:** *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.